

DETERMINAN KECURANGAN AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Abdul Hadi¹, Ikhsan Budi Raharjo², Wahidahwati³

^{1,2,3} STIESIA Surabaya

INFO ARTIKEL	<i>Abstract</i>	
Sejarah Artikel: Diterima : 2021 Diperbaiki : 2021 Disetujui : 2021	<p><i>This study aims to Examine and analyze the factors that influence village officials' tendency to commit fraud in village funds management. This study used the village apparatus in Lamongan Regency as respondents. It analyzed one hundred twelve questionnaires for hypothesis testing. In this study, the independent variables were the effectiveness of internal control, information asymmetry, organizational commitment, the suitability of compensation, and individual morality, and fraud as the dependent variable. This study applied multiple linear regression analysis tools for hypothesis testing. The results indicated that the information asymmetry had a significant positive effect and negatively impacted accounting fraud in village funds management. Furthermore, The organizational commitment, the suitability of compensation, and internal control had no effect on accounting fraud in village funds management.</i></p>	
Keywords: <i>Furthermore, The organizational commitment, the suitability of compensation, and internal control accounting fraud in village funds management.</i>		
	Abstraks	
Kata Kunci: Asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, moralitas individu, dan kecurangan (fraud).	Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan aparat desa untuk berbuat curang dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan responden dari perangkat desa di Kabupaten Lamong. Terdapat 112 kuesioner yang dapat dianalisis untuk menguji hipotesis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu sebagai variabel bebas dan kecurangan sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan dan moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana pedesaan. Komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal tidak mempengaruhi kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana pedesaan.	
DOI:		
Korespondensi: Nama: Abdul Hadi Email: abdulhadihadi261@gmail.com	ISSN: 2355-9643 (print) ISSN: 2460-3775 (online)	

PENDAHULUAN

Dampak logis dari munculnya konsep otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada era reformasi secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Proses ini dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD).). Sampai saat ini, kedua keputusan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memancing kontroversi di masyarakat, serta membuat beberapa ketidaksetujuan di sebagian masyarakat.

Sejak 2015, pemerintah telah mendistribusikan APBN ke desa atau biasa disebut dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Alokasi pendanaan daerah terus meningkat hingga tahun 2017, namun dibatalkan pada tahun 2018 karena beberapa masalah. Hampir semua mata tertuju di desa. Dimulai dengan para pejabat, ilmuwan, politisi, pengamat, dan aktivis LSM yang ingin mendalami desa tersebut. Mereka ingin melihat dinamika pembangunan pedesaan saat ini, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di pedesaan. Sebagian besar perhatian pihak desa hanya merupakan hasil pendanaan desa, yang jumlahnya telah ditingkatkan oleh pemerintah (pusat). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa dilakukan secara serius oleh pemerintah dan bukti bahwa janji politik Jokowi-JK telah terpenuhi selama kampanye pemilihan presiden 2014. Menurut Doller & Wallis (2001), distribusi dana desa memegang peranan penting dan merupakan kunci keberhasilan otonomi daerah. Kurun waktu 2015 - 2019, suntikan anggaran yang cukup besar ke desa-desa dengan alokasi dasar Rp 616.345 hingga 1 miliar, direalisasikan Rp 256,9 triliun. Peningkatan dana diharapkan dapat memajukan desa. Pemerintah menginginkan agar pelayanan bersama desa meningkat, masyarakat desa dibina, diberdayakan, dan yang terpenting desa menjadi sasaran pembangunan. Tentu saja, peran besar yang dimainkan desa membawa banyak tanggung jawab. Efisiensi dan efektivitas alokasi dana daerah

(ADD) dari pemerintah daerah / pemerintah kota kepada pemerintah daerah dan cara penggunaannya sangat penting karena merupakan parameter paling sederhana untuk keberhasilan sentralisasi (Ahmad Erani Yustika, 2008).

Layanan Manajemen Korupsi Indonesia (ICW) menilai korupsi di desa menjadi salah satu masalah mendasar, terutama terkait dengan anggaran desa. Masalah ini muncul dari pengelolaan anggaran yang besar, namun pelaksanaannya di tingkat desa tidak melibatkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan politik, pembangunan, dan keuangan desa. Di tahun 2018, tahun Pilkada 2018 dan Pilkada Serentak 2019, muncul kekhawatiran akan berbagai penyalahgunaan APBD. Kekhawatiran ini tidak semata-mata karena fenomena korupsi Rusia selama tiga tahun terakhir. Desa. Namun, perhatian publik dan media nasional terhadap desa tertuju pada fenomena bahwa kepala desa terkait dengan calon kepala daerah tertentu, terutama terkait dengan posisi strategis desa dalam rangka kemenangan pilkada yang masih terdapat kekurangan. Kurangnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat pedesaan. Koruptor desa menggunakan berbagai cara, antara lain 51 penyalahgunaan anggaran, 32 penggelapan, 17 laporan fiktif, 15 kegiatan / proyek fiktif, dan 14 pengelembungan anggaran. Dan banyak masalah terkait pengawasan dana lokal yang masih ditemukan. Berdasarkan review Direksi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017, BPK menemukan bahwa tidak ada sistem pengawasan untuk pengelolaan dana daerah.

Kementerian Dalam Negeri belum mengembangkan sistem pemantauan pengelolaan uang daerah, tidak ada aplikasi untuk memantau pengelolaan uang daerah, dan standar akuntansi yang belum ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah tidak mempertimbangkan perencanaan pembangunan pedesaan atau memprioritaskan penggunaan dana desa, dan BUMDes tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian pedesaan. Minimnya penyaluran dana daerah dari pemerintah daerah diperparah dengan banyaknya masyarakat baik desa maupun kabupaten yang menggunakan ADD tanpa hak dan kewenangan. Tentunya, potensi penyelewengan dana dari desa sangat tinggi, hal ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan aparat pemerintah daerah. Selain itu, aparat administrasi desa yang umumnya lemah itu sendiri juga kurang penting.

Berbagai fenomena tersebut disebabkan oleh kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Salah satunya adalah kecurangan akuntansi. kecurangan yang sering terjadi termasuk memanipulasi catatan, menghapus dokumen, dan markup yang merusak keuangan dan ekonomi suatu negara. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan akuntansi dapat dibagi menjadi tiga jenis: penyalahgunaan aset, klaim penipuan, dan korupsi.

Sebuah studi oleh Nurul et al. (2017) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Kepatuhan akuntansi dan komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Pengendalian internal berperan dalam membatasi kepatuhan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi (moderasi asli), tetapi asimetri informasi dan komitmen organisasi hanya memperlemah hubungan (moderasi homologasi). Selain itu, kecurangan akuntansi dan dampak negatifnya yang serius terhadap pelaporan keuangan. Selain itu, pentingnya penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas penerapan sistem pengendalian intern khususnya penerapan sistem pengendalian intern di bidang kesehatan yang dapat menjadi alat untuk prediksi dan deteksi dini. (Dibangun ke dalam sistem pemeriksaan).) Inkonsistensi atau perbedaan yang diakibatkan oleh kesalahan FKTP. / Pusat kesehatan. Penelitian Admaji dan Saputra (2017) menunjukkan bahwa kapabilitas perangkat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Moralitas telah berhasil memitigasi dampak peralatan dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi pemerintahan. Beberapa di antaranya termasuk efektivitas pengendalian internal, penerimaan penghargaan, asimetri informasi, budaya etika organisasi, dan komitmen organisasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggabungkan variabel dari beberapa penelitian, dan tujuan penelitian juga berbeda. Artinya, kecurangan akuntansi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, topik penelitian dan penelitian yang lebih relevan. Kepada perangkat desa. Manajer keuangan lokal. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul "Determinan kecurangan akuntansi dalam

pengelolaan dana desa". Berdasarkan uraian di atas, Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: ((1) Menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa, (2) Menguji dan menganalisis pengaruh asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa, (3) Menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa, (4) Menguji dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa, dan (5) Menguji dan menganalisis pengaruh moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

METODE

Jenis dan Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan adalah data utama. Pendekatan kuantitatif menurut Azwar (2008: 5) merupakan studi yang difokuskan pada analisis data numerik yang diolah dengan metode statistik tertentu. Dengan kata lain, jika data yang digunakan adalah numerik, survei menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mensurvei populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dan alat survei, serta menulis dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini terdiri dari lima variabel yaitu efektivitas pengendalian internal (EP), asimetri informasi (AI), komitmen organisasi (KO), kepatuhan kompetensi (KK), dan moralitas pribadi (MI). Survei yang dilakukan di wilayah Ramongan ini menargetkan populasinya, yaitu semua desa di wilayah Lamongan.

Salah satu keberhasilan atau kegagalan suatu penelitian adalah metode pengumpulan data. Metode diperlukan dalam pengumpulan data digunakan, sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diharapkan. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan kuesioner. kuesioner tersebut diadopsi dari kuesioner yang dilakukan oleh Firdaus (2018) yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Karyawan Melakukan Fraud Sektor Publik" dan Janita Maya (2015) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Sektor pemerintahan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk penelitiannya dan kesimpulan selanjutnya (Sugiyono, 2010: 117). Populasi survei ini adalah seluruh kepala desa, sekretaris, bendahara desa atau perangkat desa di Kabupaten Lamongan, dan menurut BPS Kabupaten Lamongan jumlah desa adalah 462 desa. Jika tiga responden memilih satu desa, jumlah populasi 1386 responden.

Menurut Sugiyono (2017: 81), sampel merupakan bagian dari ukuran dan karakteristik populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan baik waktu, tenaga, uang, maupun populasi yang sangat besar. Menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh Slovin dalam Mustafa (2010: 90), untuk menentukan ukuran sampel diambil dari populasi penelitian dengan nilai $e = 10\%$ dan tingkat kepercayaan 90% sebagai berikut.

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolelir sebesar 10% sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan sebanyak 10% .

$$n = \frac{1386}{1 + 1386 (0,1)^2} = 93,270 \approx 100$$

Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (variabel terikat) dan variabel bebas (variabel bebas). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana daerah. Variabel independen (variabel penjelas), di sisi lain, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi, seperti efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, komitmen organisasi, penerimaan penghargaan, dan moralitas pribadi.

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kecurangan akuntansi. Pengukuran variabel ini terdiri dari sembilan pertanyaan yang dirancang seputar jenis kecurangan, antara lain laporan keuangan yang mengandung kecurangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi, menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Rudianto (2012). Saat mengukur variabel ini

dengan menggunakan Skala Likert 1, 5 merupakan kecocokan yang sangat baik, dan semakin tinggi nilai yang ditampilkan maka semakin tinggi pula kejadian penipuan. Variabel Fraud diukur dengan indikator dari survei Firdaus (2017) sebagai berikut: (1) pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, (2) penyalahgunaan aset, dan (3) korupsi.

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, dan dalam penelitian variabel bebas adalah asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, dan moralitas pribadi. Diukur menggunakan kuesioner pada skala likert dari 1 sampai 5. Yaitu, (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Tidak Setuju (5).

ANALISIS DATA

Hasil Uji Statistik Deskriptif

		Statistics					
		TOTAL.F	TOTAL.AI	TOTAL.KO	TOTAL.KK	TOTAL.MI	TOTAL.PI
N	Valid	112	112	112	112	112	112
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		15,5357	15,8839	20,8393	31,7768	18,9464	20,3839
Std. Deviation		3,75830	5,22079	2,76253	3,80542	3,37409	1,94633
Minimum		8,00	6,00	10,00	14,00	9,00	14,00
Maximum		26,00	30,00	25,00	40,00	31,00	25,00

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan survei responden terhadap variabel kecurangan akuntansi, jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden minimal 8, dan jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden maksimal 26. Kecurangan variabel nilai rata-rata aktual tren adalah 15. 53. Sedangkan standar deviasi menunjukkan bahwa dari 112 responden yang disurvei, besarnya variabilitas variabel kecurangan adalah 3,75. Standar deviasi 3,75 lebih kecil dari rata-rata 15,53, menunjukkan bahwa varians data dianggap kecil.

Berdasarkan survei responden terhadap variabel asimetri informasi, jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden minimal 6, dan jumlah maksimal pertanyaan yang dijawab oleh responden adalah 30. Rerata aktual variabel asimetri informasi adalah 15,88. Simpangan baku menunjukkan bahwa sebaran variabel informasi asimetris adalah 5,22 dari 112 responden yang disurvei. Standar deviasi 5.22 lebih kecil dari rata-rata 15,88 yang menunjukkan bahwa data deviasi tergolong kecil.

Survei responden terhadap variabel komitmen organisasi menunjukkan bahwa jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden minimal 10, dan jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden maksimal adalah 25. Rata-rata variabel komitmen organisasi yang sebenarnya adalah 11,80. Simpangan baku menunjukkan bahwa besarnya sebaran variabel komitmen organisasi adalah 2,76 dari 112 responden yang disurvei. Standar deviasi 2,76 rata-rata kurang dari 20, menunjukkan bahwa deviasi data dianggap kecil.

Survei responden terhadap variabel kesesuaian kompensasi menunjukkan bahwa jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden minimum adalah 14, dan jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden maksimum adalah 40. Rata-rata variabel kesesuaian kompensasi adalah 31,77. Standar deviasi menunjukkan besarnya sebaran variabel kesesuaian kompensasi adalah 3,80 dari 112 responden yang disurvei. Simpangan baku 3,80 lebih kecil dari rata-rata 31,77 yang menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil.

Hasil survei responden terhadap variabel moralitas individu menunjukkan bahwa jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden minimal 9, dan jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden maksimal 31. Rata-rata aktual variabel moralitas individu adalah 18,94. Standar deviasi menunjukkan bahwa luas penyebaran variabel moral individu adalah 3,37 dari 112 responden yang disurvei. Simpangan baku 3,37 lebih kecil dari rata-rata 18,94 yang menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil.

Berdasarkan survei responden terhadap variabel pengendalian internal, jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden minimum adalah 14, dan jumlah pertanyaan yang dijawab oleh responden maksimum adalah 25. Rata-rata variabel moral individu yang sebenarnya adalah 20,38. Standar deviasi menunjukkan bahwa luas penyebaran variabel pengendalian internal adalah 1,94 dari 112 responden yang disurvei. Standar deviasi 1,94 lebih kecil dari rata-rata 20,38 yang menunjukkan bahwa deviasi data tergolong kecil.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a									
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	8.523	4.035		2.112	.037					
TOTAL_AI	.181	.070	.252	2.605	.011	.422	.245	.212	.708	1.411
TOTAL_KO	-.158	.118	-.116	-1.336	.185	-.106	-.129	-.109	.874	1.144
TOTAL_KK	.001	.094	.001	.012	.990	-.033	.001	.001	.735	1.360
TOTAL_MI	.410	.107	.368	3.850	.000	.488	.350	.313	.724	1.382
TOTAL_PI	-.019	.173	-.010	-.107	.915	-.021	-.010	-.009	.829	1.206

a. Dependent Variable: TOTAL F

Model persamaan regresi yang di gunakan adalah sebagai berikut

$$F = 8,523 + 0,181 AI - 0,152 KO + 0,001 KK + 0,410 MI - 0,019 PI$$

Di mana:

- F = Fraud
- AI = Asimetri Informasi
- KO = Komitmen Organisasi
- KK = Kesesuaian Kompensasi
- MI = Moralitas Individu
- PI = Pengendalian Internal

Hasil Uji Multikolinieniritas

Model	Collinearity statistics	
	Tolerance	VIF
AI	0,708	1.411
KO	0,874	1.144
KK	0,735	1.360
MI	0,724	1.382
PI	0,829	1.206

Sumber : Hasil olah data primer, 2020

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari kelima variabel independen nilai *tolerancenya* kurang dari 0.10 dan nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga layak untuk digunakan.

Hasil Uji Heteroskedastitas

Model	Nilai Signifikansi
Fraud (F)	,355
Asimetri Informasi (AI)	,008
Moralitas Individu (MI)	,422
Pengendalian Internal	,598
Komitmen Organisas (KO)	,341
Kesesuaian Kompetensi (KK)	,560

Sumber : Hasil olah data primer, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel kecurangan, komitmen organisasi, moralitas pribadi, pengendalian internal, dan kesesuaian ganti rugi mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya bisa digunakan. Sedangkan nilai signifikansi variabel asimetri informasi adalah 0,008. Artinya variabel ini memiliki masalah distribusi yang tidak seragam. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan / kerentanan yang besar antara nilai minimum dan maksimum.

Hasil uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,14778379
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,053
Kolmogorov-Smirnov Z		,865
Asymp. Sig. (2-tailed)		,443
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Hasil olah data primer, 2020

Bahwa Asymp. 0.433 Sig (kedua sisi). Karena hasil ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual untuk model regresi ini berdistribusi normal. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan dalam penelitian.

Hasil Koeffisien Determinan

Hasil Uji Koeffisien Determinan Model Summary b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.546 ^a	.299	.265	3.22117	.299	9.021	5	106	.000	1.376

a. Predictors: (Constant), TOTAL.PI, TOTAL.AI, TOTAL.KO, TOTAL.KK, TOTAL.MI
b. Dependent Variable: TOTAL.F

Berdasarkan data pada Tabel 12, diketahui hasil uji koefisien determinan menghasilkan nilai adjusted r-squared sebesar 0,299. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi variabel independen dalam mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,299 atau 29,9%. Sebanyak 70,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Uji F

Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	468.009	5	93.602	9.021	.000 ^b
	Residual	1099.848	106	10.376		
	Total	1567.857	111			

a. Dependent Variable: TOTAL.F
b. Predictors: (Constant), TOTAL.PI, TOTAL.AI, TOTAL.KO, TOTAL.KK, TOTAL.MI

Berdasarkan hasil uji F (signifikansi 0,000) lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Oleh karena itu, variasi nilai variabel independen atau variabel independen dapat menjelaskan variasi nilai dependen. Akibatnya, asimetri informasi, komitmen organisasi, kesesuaian penghargaan, moralitas pribadi, dan variabel pengendalian internal secara bersama-sama (simultan) dikoordinasikan sehubungan dengan tren kecurangan.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Pada prosedur uji probabilitas statistik t atau nilai p kita hanya membandingkan nilai probabilitas p dengan nilai signifikansi α yang kita pilih. Dalam penelitian ini menggunakan α sebesar 5%, yaitu dengan membandingkan *p-value*. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

1. Apabila *p-value* > 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila *p-value* < 5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan uji F dapat di simpulkan bahwa,

1. Variabel-variabel independen (Asimetri Informasi, Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Individu diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Kecenderungan *Fraud* adalah sebesar 8.523.
2. Koefisien uji t asimetri informasi adalah 0.181, nilai signifikansinya adalah 0.011, dan t hitungnya adalah 2.605. Dari hasil tersebut dapat di ketahui nilai signifikansi nya sebesar 0.011 yang berarti lebih kecil daripada 0.05, dan t hitung di ketahui sebesar 2.605 yang berarti lebih besar dari t tabel sebesar 1.982. Hal ini dapat diartikan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap fraud. Sehingga hipotesis pertama **diterima**.
3. Koefisien uji t komitmen organisasi adalah -0,158, nilai signifikansinya adalah 0,185, dan t hitungnya adalah -1336. Dari hasil tersebut dapat di ketahui nilai signifikansi nya sebesar 0,185 yang berarti lebih besar darip 0.05, dan t hitungnya di ketahui sebesar -1336 yang berarti lebih kecil dari t tabel sebesar 1.979. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Sehingga hipotesis kedua **ditolak**.
4. Koefisien uji t kesesuaian kompensasi adalah 0.01, nilai signifikansinya adalah 0.990, dan t hitungnya adalah 0,012. Dari hasil tersebut diketahui nilai signifikansinya sebesar 0.990 yang berarti lebih lebih besar dari 0.05, dan t hitungnya diketahui sebesar 0,012 yang berarti lebih kecil dari t tabel sebesar 1.979. hal ini dapat diartikan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap

kecenderungan *fraud*. Sehingga hipotesis ketiga **ditolak**.

5. Koefisien uji t moralitas individu adalah -0.410, nilai signifikansinya adalah 0.000, dan t hitungnya adalah 3850. Dari hasil tersebut diketahui nilai signifikansinya sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05, dan t hitungnya diketahui sebesar 5.232 yang berarti lebih besar dari t tabel sebesar 1.979. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan *fraud*. Sehingga hipotesis keempat **diterima**
6. Koefisien uji t pengendalian internal adalah -0.19, nilai signifikansinya adalah 0,915, dan t hitungnya adalah -0,107. Dari hasil tersebut diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,915 yang berarti lebih kecil dari 0.05, dan t hitungnya diketahui sebesar -0,107 yang berarti lebih kecil dari t tabel sebesar 1.979. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan *fraud*. Sehingga hipotesis keempat **ditolak**

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Akuntansi.
Koefisien uji regresi asimetri informasi adalah 0.181, nilai signifikansinya adalah 0.011. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji t, hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Kondisi semacam itu tentu saja dapat membuka peluang bagi perangkat pemerintah desa untuk melakukan kecurangan dengan menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya semata-mata hanya karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja yang telah dilakukan dengan memanipulasi informasi keuangan. Dengan kata lain asimetri informasi merupakan kondisi dimana adanya ketidakselarasan informasi yang di terima antara pihak yang menyediakan informasi atau yang memiliki informasi dengan pihak yang menerima atau membutuhkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.
2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi.
Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi komitmen organisasi. komitmen organisasi memiliki nilai koefisien

negatif sebesar -0,158, nilai signifikansinya adalah 0,185. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi pada suatu pemerintahan desa tidak akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Menurut teori *fraud triangle*, salah satu aspek dalam teori ini adalah kesempatan. Menurut Pravitarsari, (2016) kesempatan adalah situasi terbukanya kesempatan bagi pegawai yang memungkinkan untuk terjadinya tindak kecurangan. Adanya kesempatan atau peluang tersebut karena pengendalian internalnya lemah, pengawasan yang kurang baik, serta lemahnya penegakan hukum di instansi tersebut.

3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi
Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi variabel penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki nilai koefisien -0.19, nilai signifikansinya adalah 0,915. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tegak atau tidaknya pengendalian internal tidak akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Menurut teori *fraud triangle*, salah satu aspek dalam teori ini adalah kesempatan. Menurut Pravitarsari (2016) kesempatan adalah situasi terbukanya kesempatan bagi pegawai yang memungkinkan untuk terjadinya tindak kecurangan. Adanya kesempatan atau peluang tersebut karena pengendalian internalnya lemah, pengawasan yang kurang baik, serta lemahnya penegakan hukum di instansi tersebut.
4. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Akuntansi
Pengujian dilakukan melalui signifikansi regresi variabel kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi memiliki nilai 0.01, nilai signifikansinya adalah 0.990. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji regresi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Firdaus (2017) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan sebuah kecurangan. Namun penelitian ini juga berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Softian (2017), Dewi (2017), dan Pravitasari (2016).

5. Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi.

Pengujian dilakukan melalui signifikansi regresi variabel moralitas individu. Moralitas individu memiliki nilai koefisien negatif -0.410, nilai signifikansinya adalah 0.000. Seperti yang sudah diujikan dengan menggunakan uji regresi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Moralitas merupakan suatu hal penting yang dapat mempengaruhi perilaku seorang individu. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengobservasi dasar individu dalam melakukan tindakan adalah *theory fraud triangel*. Salah satu aspek yang terdapat pada teori ini adalah rasioanlisasi. Rasioanlisasi adalah sikap karakter atau serangkaian nilai nilai etis yang memperbolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan yang tidak jujur.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji analisis data maka Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan yaitu determinan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Ini karena semakin tinggi asimetri informasi administrator dan pengguna, semakin besar kemungkinan terjadinya penipuan.
2. Komitmen organisasi tidak mempengaruhi kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada tidaknya komitmen organisasi dalam organisasi tidak mempengaruhi kecurangan seseorang.
3. Kesesuaian kompensasi tidak

mempengaruhi kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Ini membuktikan bahwa pemberian promosi, kompensasi, atau bonus yang layak kepada aparat desa tidak akan berpengaruh jika seseorang melakukan penipuan.

4. Pengendalian intern tidak mempengaruhi kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut membuktikan bahwa ada atau tidak adanya pengendalian internal tidak mempengaruhi orang yang melakukan kecurangan.
5. Moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa individu masih enggan melakukan kecurangan, walaupun pengendalian internal organisasi lemah, jika individu tersebut memiliki tingkat moral yang tinggi atau baik dan berkepribadian jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y. M., dan Ikhsan, S. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4(3), h. 1-9.
- AICPA, SAS No. 99.2002. "Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, AICPA". New York.
- Alatas. 1987. *Korupsi Sifat Dan Fungsi*. Jakarta : LP3ES
- Albercht, W. Steve, Chad O. Albercht, Conan C. Albercht, Mark F. Zimbelman. 2011. *Fraud Examination*. Mason: Cengage Learning.
- Albrecht et al. 2012. *Fraud Examination*. Thrid Edition. South Western. A part of Chengange Learning. USA.
- Amrizal. 2004. *Pencegahan dan Pendektesian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Jakarta.
- Arfan, Ikhsan dan Muhammad Ishak. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Atmadja, Anantawikram Tungga dan Komang Adi Kurniawan Saputra. 2017. *Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Volume 12, Nomor 1. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Universitas Pendidikan Ganesha: Bali.
- Ayuningtyas, Harvita Yulian, dan Sugeng Pamudji. 2012. "Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas Dan

- Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit”
Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 1
No.2.
- COSO. 2004. Enterprise Risk Management-
Integrated Framework. The Committee Of
Sponsoring Organizations Of The Treadway
Commission.
- Dellaportas, S. 2013. Conversations with inmate
accountants: Motivation, opportunity and
the fraud triangle. *Accounting Forum* 37
(2013) 29-39.
- Firdaus. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kecenderungan Pegawai
Melakukan Kecurangan/Fraud Pada Sektor
Pemerintahan (Studi Kasus Pada
Pemerintahan Di Kabupaten Klaten). *Jurnal
UII: Yogyakarta*.
- Green, Stephen G. And Terence R. Mitchell.1979.
“Attributional Processes of Leaders in
Leader-Member Interactions”, dalam
*Organizational Behavior and Human
Performance*.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Multivariate
dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima).
Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of
Interpersonal Relations*, New York: Wiley
- IAI.2001. Standar Profesional Akuntan
Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2015-
2017. Jumlah Kasus Korupsi. ICW, Jakarta.
- Kelley, Harold H. (1967). Attribution Theory in
Social Psychology. *Nebraska Symposium on
Motivation*, Vol 15, 1967, 192-238.
- Kyalo, Shadrack Maweu, Aquilars M. Kalio, and
Solomon Ngahu. "Role of Fraud
Prevention in Enhancing Effective Financial
Reporting in County Governments in Kenya:
Case of Nakuru County, Kenya."
- Lin, et al. 2006. The Effect of Audit Committee
Performance on Earnings Quality. *Managerial
Auditing Journal*, 21 (9).
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba
Empat.
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja. 2010. *Auditing*,
Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurul et al .2017. Accounting Fraud: Determinant,
Moderation Of Internal Control System And
The Implication To Financial Accountability .
International Conference and Call for Papers.
Jember.
- Norbarani, Listiana. 2012. "Pendeteksian
Kecurangan Laporan Keuangan Dengan
Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi
Dalam SAS NO.99". Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Permatasari, D., Kurrohman, T., & Kartika. (2017).
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Terjadinya Kecenderungan Kecurangan
(Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi pada
Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi. *Jurnal Keuangan Dan
Perbankan*, 14(1), 37-44.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Dalam Negeri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
APBN.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Ratmono. (2014). Can Fraud Triangle detect the
fraud?. Universitas Diponegoro.
- Singleton, T, et al. 2006. *Fraud Auditing and
Forensic Accounting*, Third Edition. New
Jersey : Wiley.
- Spillane, James J. (2003). *Pariwisata dan Wisata
Budaya*, CV. Rajawali.
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. (E.
Mulyatiningsih, Ed.). Jawa Barat: CV
ALFABETA
- Susanto, Azha. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*.
Cetakan Pertama Bandung: Lingga Jaya.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*.
Jakarta: Erlangga. Syahrina, D., Irianto, G., &
UU No 33
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun (2004) Tentang
Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 22 Tahun (1999) Tentang
Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun (1999) Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 31 Tahun (1999) Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 10 Tahun (2004) Tentang
Pembentukan Peraturan Daerah.
- Vona, Leonard W. 2008. *Fraud Risk Assessment*

Determinan Kecurangan Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa
Abdul Hadi, Ikhsan Budi Raharjo, Wahidahwati

Building A Fraud Audit Program. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Yanita. 2015. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. Jurnal

Akuntansi Dan Pendidikan. UNNES.
Waworuntu, Bob. 2003. Determinan Kepemimpinan. Makalah Sosial Humaniora, vol.7, no. 2, Desember 2003.